Jurnal Wacana Kinerja
Volume 21 | Nomor 1 | Juni 2018 | 117 – 130
DOI: 10.31845/jwk.v21i1.83

Faktor Faktor yang Memengaruhi Implementasi Perencanaan Strategis di Kecamatan Rappocini Kota Makassar

The Influencing Factors that Affect The Implementation of Strategic Planning in Rappocini District Makassar City)

Hariawan Bihamding[1]

BPSDM Kemendagri
Jalan Taman Makam Pahlawan No 8 Kalibata jakarta Selatan
Tlp. (021) 7991958

(Diterima 17/05/18; revisi 02/07/18)

Abstract

Rappocini Sub-district in Makassar City has implemented development planning based on strategic planning model. Implementation of this planning model undergo dynamics and developments according to current conditions. Therefore, this study aims to analyze the factors affect the implementation of strategic planning in Kecamatan Rappocini, Makassar City. This research used qualitative approach and descriptive research method. The results showed that the implementation level of strategic planning in Rappocini Sub-district of Makassar City is quite good. The variables affecting the implementation of strategic planning in Rappocini sub-district are community participation, the apparatus competence, regional finance and local infrastructure. The public participation in the implementation of the strategic planning model have to be improved. The local government should take the persuasive approach to encourage public participation in the process of the strategic planning.

***Keywords**: Implementation and Strategic Planning*

Abstrak

Kecamatan Rappocini di Kota Makassar melaksanakan perencanaan pembangunan dengan berbasis perencanaan strategis (renstra). Implementasi pola perencanaan ini mengalami dinamika dan perkembangan sesuai kondisi yang ada. Banyak faktor yang memengaruhi implementasi perencanaan strategis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi implementasi renstra di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi terhadap perencanaan strategis di Kecamatan Rappocini Kota Makassar cukup baik. Variabel yang memengaruhi implementasi perencanaan strategis di Kecamatan Rappocini adalah partisipasi masyarakat, kemampuan aparat, keuangan daerah, sarana dan prasarana. Partisipasi masyarakat dalam implementasi Renstra masih perlu ditingkatkan. Pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan persuasif untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam proses implementasi renstra.

Kata Kunci: implementasi, pembangunan dan perencanaan strategi

[1] Email : bihamding.hariawan@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya menggerakkan roda pembangunan, diperlukan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berkaitan erat dengan statemen dari United Nations Development Project (UNDP) tentang konsepsi tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara (LAN & BPKP, 2000:145). Karakteristik atau ciri-ciri dari *good governance,* dapat dipaparkan sebagai berikut: (1). *Participation*; (2). *Rule of Law*; (3). *Transparancy*; (4). *Responsiveness*; (5). *Consensus;* (6). *Equity*; (7). *Effectiveness and Efficiency*; (8). *Accountability* (9). *Strategic vision*. Kesembilan karakteristik tersebut saling memperkuat, bersinergi, dan tidak dapat berdiri sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, semakin dituntut untuk lebih demokratis, transparan dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui sebuah pendekatan yang lebih mengutamakan pendekatan pencapaian visi daripada pendekatan pencapaian target. Pendekatan pencapaian visi adalah suatu pendekatan yang dianggap paling sesuai mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Selain itu pendekatan ini juga sangat fleksibel, dalam arti senantiasa dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan variasi tuntutan aspirasi masyarakat. Keberhasilan menangkap dan mengimplementasikan aspirasi masyarakat diukur dari kemampuan merumuskannya dalam perencanaan strategis atau dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra).

Renstra adalah salah satu dokumen perencanaan yang bersifat taktis strategis di berbagai lingkup (nasional/daerah), di mana substansi yang terkandung di dalamnya adalah penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Nasional/Daerah yang merupakan dokumen perencanaan induk yang memuat komitmen politis, visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Selain itu Renstra berpedoman pada Program Pembangunan Nasional/Daerah (Propenasda) yang memuat daftar indikasi program pembangunan. Dalam manajemen pembangunan, pengelolaan barang publik tidak hanya melibatkan para manajer profesional tetapi melibatkan juga para pengambil keputusan publik yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Keterlibatan berbagai elemen ini merupakan prasyarat di mana kepentingan banyak pihak memegang peran utama.

Kota Makassar khususnya Kecamatan Rappocini telah mengagendakan perencanaan pembangunan dengan mengimplementasikan Renstra. Sistem perencanaan pembangunan ini telah dilaksanakan mengikuti ketentuan dan sudah bergulir sejak awal. Implementasi pola perencanaan ini mengalami dinamika dan perkembangan sesuai kondisi yang ada. Mulai dari mempelajari, melaksanakan hingga melewati beberapa perubahan dalam upaya penyempurnaan kebijakan tersebut. Dengan melihat realitas ini, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan perencanaan strategis yang selama ini sudah diterapkan, apakah sesuai dengan harapan pemerintah atau sebaliknya. Demikian pula, adanya dukungan seperti: SDM Aparat, keuangan daerah, dan sarana prasarana ikut menentukan bagaimana proses implementasi perencanaan strategis tersebut. Oleh karena itu, Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah factor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi perencanaan strategis di Kecamaan Rappocini Kota Makassar.

2. TINJAUAN TEORITIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1 Konsep Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (WJS Poerwadarminta, 2008), mengartikan implementasi sebagai, pelaksanaan; penerapan. Sedangkan Kamus Webster dalam (Wahab, 2001:64) merumuskan secara pendek bahwa, "*to implement*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide the means for carrying out*"; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); "*to give practical efect to*" (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2001:64) dikemukakan bahwa proses implementasi sebagai "*those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*" (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanan). Adapun, model yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn pada proses implementasi kebijakan sebagai berikut :

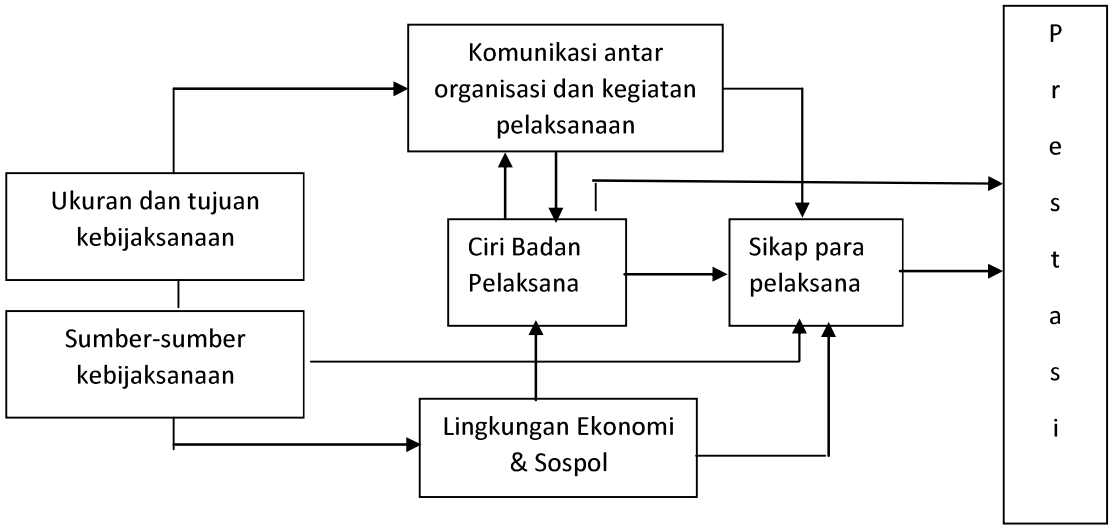

Gambar 1. Model Proses Implementasi Kebijaksanaan
Sumber: Abdul Wahab (2001: 64)

Variabel-variabel kebijaksanaan bersangkut paut dengan tujuan yang telah digariskan dan sumber yang tersedia, hal ini terlihat pada Gambar 1 dengan ditandai berupa garis yang diindikasikan adanya keterkaitan. Sedangkan tanda panah menandakan adanya arah dalam proses pelaksanaan. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antarorganisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antarhubungan di dalam lingkungan sistem politik dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan.

Makna implementasi ini terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni: kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan

negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Selanjutnya oleh Mazmainian dan Sabatier menetapkan pula variabel proses implementasi kebijaksanaan sebagai berikut: *pertama*, mudah/tidaknya masalah dikendalikan dengan subvariabel; kesukaran-kesukaran teknis, keragaman prilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk, ruang lingkup perubahan prilaku yang diinginkan. *Kedua*, kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan subvariabel; kejelasan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal yang memadai, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki dalam dan antara lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana, dan rekruitmen pejabat pelaksana serta akses formal pihak luar. Kemudian *ketiga*, variabel di luar kebijaksanaan yang memengaruhi proses implementasi kebijaksanaan dengan subvariabel meliputi: kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana. (Sabatier, 1983). Dari ketiga variabel ini menarik untuk dikaji lebih mendalam namun tidak untuk semuanya. Oleh karena itu, penulis hanya menetapkan yang utama saja dan yang paling memungkinkan.

Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan implementasi adalah rangkaian kegiatan dari suatu keputusan guna mencapai tujuan tertentu. Keputusan tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijaksanaan yang secara berkelanjutan menjadi program dan proyek. Implementasi merupakan bentuk pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan. Konsep ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai implementasi itu sendiri. Sebab, alur dalam penulisan ini berawal dari adanya Renstra yang berupa perencanaan atau pedoman yang telah disepakati, lalu dilaksanakan dalam realitas kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui konteks partisipasi. Implementasi menjadi penting, karena menghubungkan antara bentuk Renstra dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan dukungan masyarakat. Dengan implementasi ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan atau Renstra tidak sekedar dalam bentuk konsep atau pedoman saja, namun telah menjadi sebuah kegiatan atau program yang dijalankan. Sehingga, konteks ini menjadi salah satu wadah untuk menggiring menuju dalam pencapaian tujuan penulisan.

2.2 Konsep Perencanaan Strategis

Dalam proses manajemen, perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan sangat penting, karena adanya perencanaan yang baik dapat menjamin terlaksananya tindakan atau pelaksanaan yang baik pula dan tentunya sepanjang tidak terjadi penyimpangan pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Siagian, (2009:108) mengemukakan pendapatnya bahwa perencanaan adalah, "keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan".

Konsep mengenai perencanaan sering dijelaskan sebagai suatu proses analitis dalam pengambilan keputusan dan menentukan berbagai langkah serta tindakan terhadap berbagai alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Watterson (Conyers, 2001:4), perencanaan adalah, "usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu".

Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur perencanaan yaitu:

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai;
b. Memiliki sumber yang tersedia baik berupa dana, tenaga, metode maupun peralatan dan sebagainya;
c. Mempunyai jadwal kerja yang merupakan dasar bagi pengaturan aktivitas perencanaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Perencanaan *(planning)* merupakan fungsi yang pertama dan bahkan yang sangat utama dalam setiap aktivitas-aktivitas manajamen atau administrasi. Perencanaan merupakan dasar, landasan atau titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan administratif *(administrative action).* Dalam tahap perencanaan dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas-aktivitas administrasi atau manajemen.

Silalahi (2000:167) mengemukakan beberapa tujuan perencanaan, yaitu: (1) Perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan *(a way to anticipate and offset change)*; (2) Perencanaan memberikan pengarahan *(direction)* kepada administrator-administrator maupun nonadministrator; (3) Perencanaan juga dapat menghindari tumpang tindih dan pemborosan *(wasteful)* pelaksanaan aktivitas-aktivitas; (4) Perencanaan menetapkan tujuan dan standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan.

Dengan demikian, dapat diungkapkan bahwa perencanaan merupakan fungsi organik manajemen yang di dalamnya terdapat perumusan atau pemilihan yang teliti dari berbagai aspek dan kegiatan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Adapun konsep-konsep stratejik selalu memberi perhatian serius terhadap perumusan tujuan dan sasaran organisasi, faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahannya serta peluang-peluang dan tantangan yang senantiasa dihadapi oleh setiap organisasi (Salusu, 2000:6).

Perencanaan stratejik *(strategic planning)* merupakan bagian yang esensial dari manajemen stratejik karena perencanaan stratejik merupakan aspek utama manajemen stratejik dan dapat dianggap sebagai pilar sentral manajemen stratejik (Tunggal, 2003:152). Intisari dari suatu perencanaan stratejik adalah kemungkinan untuk pengenalan sistematis dari peluang dan ancaman di masa yang akan datang, dengan pilihan langkah-langkah yang lebih tepat akan lebih menguntungkan perusahaan. Beberapa ciri khas dari proses perencanaan stratejik adalah: (1) Perencanaan menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang; (2) Perencanaan stratejik adalah usaha sistematis formal untuk menggariskan wujud utama dari organisasi, sasaran-sasaran, kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi untuk tercapainya sasaran-sasaran dan wujud utama tersebut; (3) Proses perencanaan stratejik adalah sarana mengambil keputusan yang paling penting. Di sinilah tujuan dan arah dasar ditentukan; (4) Proses perencanaan stratejik merupakan suatu kegiatan manajemen puncak yang berlangsung terus-menerus; (5) Perencanaan stratejik merupakan suatu struktur perencanaan yang mengintegrasikan rencana stratejik dan rencana operasional jangka panjang; (6) Perencanaan stratejik merupakan suatu proses menentukan terlebih dahulu mengenai apa yang dilakukan, kapan dilakukan dan cara bagaimana melakukan dan siapa yang akan melakukan; (7) Proses perencanaan stratejik menghasilkan sebuah dokumen tertulis atas basis berkala; (8) Proses perencanaan stratejik merupakan sarana mengambil keputusan yang paling penting; (9) Perencanaan stratejik merupakan suatu sikap, *way of life (falsafah)* artinya perencanaan meminta suatu kebiasaan dan keharusan untuk bekerja berdasarkan pikiran-pikiran masa depan. Perencanaan stratejik merupakan suatu proses berpikir latihan intelektual daripada perangkat proses/prosedur, struktur atau teknik yang telah ditentukan.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar di atas, maka dapat ditarik sebuah simpulan bahwa perencanaan strategis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
b. mengenali lingkungan tempat organisasi mengimplementasikan interaksinya;

c. menganalisis untuk mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
d. menetapkan kebijaksanaan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Model perencanaan strategis secara umum dapat dilihat dari contoh model yang diberikan oleh Whittaker (1993: 455) sebagai berikut :

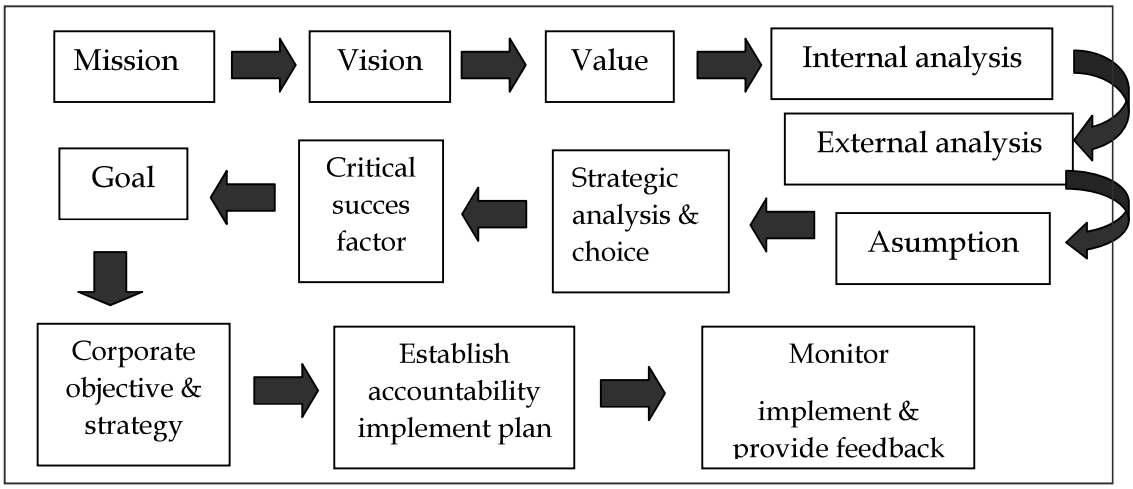

Gambar 2. Model Perencanaan Strategis
Sumber: Whittaker (1993 : 455)

Perencanaan strategis bagi pemerintah daerah dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat digunakan oleh para pemimpin pemerintahan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan organisasi pemerintahannya, kemudian mengembangkan struktur, staf, prosedur, operasionalisasi, serta pengendalian sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan yang diinginkan itu (Salusu, 2000: 23).

Dalam pembangunan suatu kota diterapkan pula konsep perencanaan stratejik. Menurut Weir (1992: 234) perbedaan rencana stratejik dan rencana umum adalah :

Tabel 1. Perbandingan Rencana Proses dan Rencana Konvensional

No	Rencana stratejik	Rencana konvensional
1	Selektif	Luas
2	Beberapa persoalan kota memenuhi syarat	Hanya rencana pengembangan konvensional
3	Kota dalam konteks lingkungan	Kota dalam batasannya
4	Tidak tergantung waktu	10 sampai 25 tahun
5	Proses melanjutkan aksi khusus	Proses sebagian dilaksanakan melalui program perbaikan kota, tindakan lingkungan, kadang-kadang pelaksanaannya dikemukakan dengan jelas.
6	Besar partisipasi pemerintah kota dan seluruh masyarakat	Sebagian besar dibatasi dengan departemen perencanaan, komisi perencanaan dan pendengar

Sumber: Weir (1992 : 234)

Dengan demikian salah satu hal yang membedakan perencanaan stratejik (strategis) dan perencanaan konvensional adalah tingkat partisipasi masyarakat. Perencanaan strategis dalam konteks manajemen perkotaan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan

melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penggalian ide/gagasan hingga pengambilan keputusan untuk menjadi sebuah rencana strategis (renstra).

Dalam perkembangannya perencanaan pembangunan melalui musyawarah sangat penting sebagai rencana pada masa mendatang. Rencana strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi dan Pusat merupakan bentuk implementasi yang digulirkan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Untuk memahami tentang Musrenbang dapat diketahui dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa, "Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah" (Pasal 1 Ayat 16). Berdasarkan pengertian tersebut Musrenbang dapat dikatakan sebagai suatu forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan usulan perencanaan pembangunan di wilayahnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode deskripitif dengan pendekatan kuantitatif, dengan tujuan mencari hubungan antara tingkat keberhasilan implementasi perencanaan strategis di Kota Makassar (kasus di Kecamatan Rappocini). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *product moment* dengan menggunakan persamaan:

$$r_{yx} = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{(\Sigma x^2)(\Sigma y^2)}}$$

Dimana : X adalah faktor penyebab
Y adalah faktor akibat
(Sugiyono, 2004:148)

Agar hasil analisis ini dapat diartikan maka diperlukan pedoman interpretasi koefisien korelasi seperti yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2004 : 149)

Kemudian untuk pengujian hipotesis lebih lanjut digunakan Uji-T dengan rumus sebagai berikut:

$$T = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber : Sugiyono (2004 : 150)

3. 1. Variabel Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka variable-variabel yang akan diamati dalam penelitian ini :

a. Variabel terikat *(dependent variable)* yaitu perencanaan strategis.
b. Variabel bebas (*Independent variable)* yaitu implementasi, meliputi :
   X_1 = Kemampuan SDM Aparat
   X_2 = Keuangan daerah
   X3 = Sarana prasarana
   X4 = Partisipasi Masyarakat (perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan).

3. 2. Definisi Operasional Variabel

a. Aplikasi perencanaan strategis (Y) adalah penerapan rencana strategis Kota Makassar dalam bentuk program dan kegiatan di lokasi penelitian.
b. Kemampuan SDM Aparat (x_1) adalah tingkat pendidikan, keterampilan serta pengalaman kerja aparat Pemerintah Kota Makassar
c. Keuangan Daerah (x_2) adalah dukungan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD di Kota Makassar.
d. Sarana prasarana (x_3) adalah kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar.
e. Partisipasi Masyarakat adalah tingkat keikutsertaan masyarakat di Kecamatan Rappocini dalam berpartisipasi pada program dan kegiatan yang merupakan aplikasi rencana strategis Kota Makassar. Partisipasi dalam penelitian ini mencakup dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Kondisi Eksisting Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari empat belas kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang di sebelah utara, Kecamatan Panakkukang/Manggala dan Kabupaten Gowa di sebelah timur, Kecamatan Tamalate di sebelah selatan dan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Makassar di sebelah barat. Kecamatan Rappocini merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian antara 5—8 m dapl. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke kecamatan berkisar 1 km sampai dengan jarak 5--10 km.

Kecamatan Rappocini terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 9,23 km. Dari luas wilayah tersebut tampak bahwa Kelurahan Gunung Sari memiliki wilayah terluas yaitu 2,31 km, terluas kedua adalah Kelurahan Karunrung dengan luas wilayah 1,52 km, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Bontomakkio yaitu 0,20 km. Kecamatan Rappocini terdiri dari 10 kelurahan, 573 ORT dan 107 ORW dengan kategori kelurahan swasembada. Lembaga dan organisasi tingkat kelurahan yang terbentuk di Kecamatan Rappocini dengan sejumlah anggotanya diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan. Organisasi atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Rappocini terdapat 1 unit di setiap kelurahan.

Menurut hasil proyeksi penduduk pada tahun 2014 di kecamatan Rappocini, jumlah penduduknya sekitar 161.650 jiwa. Angka proyeksi ini diperoleh dengan menghitung pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 78.720 jiwa dan perempuan sekitar 82,930 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 94,09 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 94 orang penduduk laki-laki (BPS Kota Makassar, 2015).

4. 2. Faktor Faktor yang Memengaruhi Implementasi Perencanaan Strategis Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Hasil penelitian secara singkat dikemukakan bahwa untuk memperoleh faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Rencana Strategis Kota Makassar di Kecamatan Rappocini dilakukan analisis dengan menggunakan tabel silang yang dilanjutkan dengan analisis chi-kuadrat dan koefisien kontingensi. Pengisian ini dimungkinkan kalkulasi dan analisisnya dengan mengambil hasil pada pengolahan data dengan rumusan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Hasil perhitungan variabel-variabel berupa: dukungan kemampuan aparatur, keuangan daerah dan sarana prasarana dalam implementasi Renstra Kota Makassar serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Impelementasi Rencana Strategis Kota Makassar di Kecamatan Rappocini Menurut Dukungan Kemampuan Aparatur, Keuangan Daerah, Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat

X	Y	$\times^2$hit	$\times^2$ tabel	H° Status	C (IKH)	Hubungan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kemampuan SDM aparat	Aplikasi Renstra	31,75	16,92	Ditolak	0,67	Kuat	0,05
Keuangan Daerah		28,64	16,92	Ditolak	0,64	Kuat	0,05
Sarana Prasarana		21,24	16,92	Ditolak	0,58	Sedang	0,05
Partisipasi dlm Perencanaan		24,64	16,92	Ditolak	0,61	Kuat	0,05
Partisipasi dlm Pelaksanaan		15,32	16,92	Diterima	0,52	Sedang	0,05
Partisipasi dlm Pemeliharaan		5,68	16,92	Diterima	0,36	Rendah	0,05

Sumber : Hasil Kalkulasi/Analisis Data, 2017

Antara kemampuan SDM aparat (X^1) dengan aplikasi renstra (Y) menunjukkan nilai $\times^2$ hitung = 31,75 lebih besar daripada nilai $\times^2$ tabel pada taraf kepercayaan 0,05 (d,b,g) = 16,92 yang menunjukkan bahwa H° ditolak dan Hα diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan antara variasi kemampuan SDM aparat dengan aplikasi Renstra Kota Makassar di Kecamatan Rappocini. Selanjutnya hasil analisis uji kontinjensi pada taraf kepercayaan 95 persen menghasilkan nilai sebesar 0,67 (IKH=0,67). Hal ini berarti, bahwa antara kemampuan SDM aparat dan aplikasi Renstra memiliki hubungan yang kuat. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat memegang peran yang sangat penting. Aparat merupakan penggerak dan mediator penting dalam pengaplikasian rencana strategis. Aparat yang memiliki kemampuan yang baik akan mampu menyampaikan serta mengaplikasikan dengan baik amanat yang terdapat dalam Renstra tersebut. Demikian pula dalam mengarahkan dan mengantisipasi kendala serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dapat segera ditangani dengan kemampuan aparat yang berkompeten tersebut.

Hasil wawancara dengan beberapa responden serta rekapitulasi data yang diperoleh diakui bahwa dukungan dengan kemampuan (SDM) aparatur baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan sudah cukup bagus. Terbukti bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang maupun dalam proses pelaporan serta administrasi pembangunan lainnya, aparat sudah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pelaksanaan Musrenbang senantiasa berjalan lancar, demikian pula bentuk pelaporan ke tingkat kecamatan dan pemerintah kota sudah berjalan baik, tanpa kendala atau hambatan yang berarti. Hal yang penting lainnya pun seperti ketersediaan data potensi wilayah di kelurahan dan kecamatan, serta data-data pendukung lainnya telah ada dan tersedia lengkap. Semua ini tentunya didasarkan atas kemampuan mengolah data dan kesadaran aparat akan tugas pokok dan fungsinya yang semakin baik. Demikian pula tingkat pendidikan umumnya sudah optimal dengan data yang terpantau mayoritas aparat kelurahan dan kecamatan sudah mencapai jenjang pendidikan S1 dan S2. Realitas ini cukup memberikan gambaran bahwa kemampuan aparat di Kecamatan Rappocini cukup baik atau sudah mumpuni, belum lagi jika dilihat dari tingkat keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sering dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar, rata-rata tiap aparat selalu mengikuti diklat secara berkala dengan berbagai materi atau kajian diklat yang berbeda tiap tahunnya.

Antara Keuangan Daerah ($\times^2$) dengan aplikasi perencanaan strategis Kota Makassar (y) menunjukkan nilai $\times^2$ hitung = 28,64 lebih besar daripada nilai $\times^2$ tabel pada taraf kepercayaan 0,05 (d,b,9) = 16,92 yang menunjukkan bahwa H° ditolak dan Hα diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara keuangan daerah dengan variasi tingkat aplikasi perencanaan strategis Kota Makassar di Kecamatan Rappocini. Selanjutnya hasil analisis uji kontingensi pada taraf kepercayaan 95 persen menghasilkan nilai sebesar 0,64 (IKH = 0,64). Hal ini berarti bahwa antara variabel keuangan daerah dan variabel aplikasi rencana strategis Kota Makassar dikategorikan memiliki hubungan yang kuat.

Dukungan keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting, sebab aplikasi rencana strategis membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan program-program yang diamanatkan dalam renstra. Hasil pengolahan data tersebut memperlihatkan bahwa terdapat dukungan keungan yang memadai dalam mengaplikasikan Renstra di Kecamatan Rappocini, meskipun belum optimal sesuai harapan masyarakat. Namun demikian, masyarakat tetap memahami kendala tersebut sambil berupaya agar ke depan serapan anggaran di wilayahnya dapat diperbesar guna mengakomodir berbagai kebutuhan yang ada.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa alokasi dana dalam mengimplementasikan Renstra di Kecamatan Rappocini cukup bagus. Hal ini, dikarenakan Kecamatan Rappocini merupakan wilayah pengembangan Kota Makassar yang padat

penduduknya dan memiliki luas wilayah yang besar dengan 10 kelurahan. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden mengakui bahwa dukungan keuangan daerah di wilayah Kecamatan Rappocini cukup memadai karena disamping alasan yang dikemukakan di atas, salah satu hal yang amat penting yakni posisi Kecamatan Rappocini yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa dan memiliki akses atau jalan penghubung utama. Kemudian, beberapa sarana penting seperti perkantoran, pusat bisnis, pemukiman elit, pasar, pelayanan kesehatan, dan lokasi perguruan tinggi negeri/swasta turut menjadi penguat dukungan keuangan atau alokasi anggaran yang besar bagi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Rappocini.

Demikian pun dari sisi jumlah penduduk, Kecamatan Rappocini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang terbesar. Dengan melihat realitas ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar pasti tidak akan mengenyampingkan potensi tersebut sebagai acuan dalam menggelontorkan anggaran pembangunan yang dimiliki. Penduduk yang padat dan banyak juga merupakan potensi pendulangan suara dalam Pilkada atau Pemilu sehingga senantiasa harus mendapat prioritas dalam implementasi program pembangunan.

Keterkaitan antara sarana prasarana ($\times^3$) dengan aplikasi perencanaan strategis Kota Makassar (y) menunjukkan nilai $\times^2$ hitung = 21,24 lebih besar daripada nilai $\times^2$ tabel pada taraf kepercayaan 0,05 (d,b,9) = 16,92 yang menunjukkan bahwa H°ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan antara variasi sarana prasarana dengan variasi tingkat aplikasi perencanaan strategis Kota Makassar di Kecamatan Rappocini. Selanjutnya hasil analisis uji kontingensi pada taraf kepercayaan 95 persen menghasilkan nilai sebesar 0,58 (IKH=0,58). Hal ini berarti bahwa antara variabel sarana prasarana dan variabel aplikasi rencana strategis Kota Makassar dikategorikan memiliki hubungan yang sedang.

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana dalam mengaplikasikan Renstra di Kecamatan Rappocini belum optimal (sedang). Setelah dianalisis melalui hasil wawancara beberapa responden memperlihatkan bahwa argumen belum maksimalnya dukungan sarana prasarana tersebut karena tingkat ketersediaan sarana prasarana itu sendiri yang belum memadai akibat anggaran yang terbatas. Sehingga, bila dicermati hal ini seperti siklus atau mata rantai yang tidak terputus, di mana sebab akibat saling terkait. Dapat diakui pula bahwa dalam realitas yang ada, sebagaian besar pemerintah kota/kabupaten belum memiliki sarana prasarana pendukung yang memadai akibat dari terbatasnya anggaran. Hanya beberapa pemerintahan kota/kabupaten yang memiliki PAD yang besar seperti DKI Jakarta yang mempunyai sarana prasarana pendukung yang cukup baik. Hasil tanggapan beberapa responden menyadari akan hal tersebut dan memahami keterbatasan anggaran namun tetap mengharapkan agar kendala seperti ini bisa segera teratasi. Dukungan sarana prasarana diyakini sangat penting terutama dalam pengaplikasikan rencana strategis yang berwujud proyek-proyek fisik. Sarana seperti peralatan, kendaraan, dan sebagainya amat dibutuhkan dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan. Demikian juga prasarana seperti jalan, drainase, perkantoran dan lain sebagainya ikut berkontribusi besar sebagai indikator suksesnya program pembangunan yang dilaksanakan.

Antara partisipasi masyarakat dalam perencanaan ($\times^2$) dengan aplikasi perencanaan strategis Kota Makassar (y) menunjukkan nilai $\times^2$ hitung = 24,64 lebih besar daripada nilai $\times^2$ tabel pada taraf kepercayaan 0,05 (d,b,9) = 16,92 yang menunjukkan bahwa H° ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan antara variasi intensitas keterlibatan responden dalam perencanaan dengan variasi tingkat aplikasi perencanaan strategis Kota Makassar di Kecamatan Rappocini. Selanjutnya hasil analisis uji kontingensi pada taraf kepercayaan 95 persen menghasilkan nilai sebesar 0,61 (IKH = 0,61). Hal ini berarti bahwa antara variabel keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan variabel aplikasi rencana strategis Kota Makassar dikategorikan memiliki hubungan yang kuat.

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Rappocini dalam tahap perencanaan sudah cukup bagus. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan data yang diperoleh memberikan hasil positif. Hal ini menyiratkan adanya kesadaran yang besar akan bentuk partisipasi dalam perencanaan, terutama dalam keterlibatan pada penyelenggaraan Musrenbang atau rapat-rapat RT/RW dan kelurahan lainnya. Tingkat kehadiran masyarakat atau partisipasinya tersebut mencerminkan bahwa masyarakat sedikit banyaknya telah memiliki kecenderungan atau kepedulian untuk ikut berkiprah dalam mengatasi permasalahan yang ada di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sangat berpengaruh dalam suksesnya aplikasi Renstra. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan, maka masyarakat akan merasa turut menjadi bagian dalam penyusunan Renstra. Demikian pula dari hasil pendapat beberapa responden mengakui bahwa bila ikut dalam tahap perencanaan, maka mereka akan tahu betul dari awal program tersebut dan merasa memiliki, sehingga jika terlaksana akan menjadi tanggung jawab bersama dan mendapatkan dukungan penuh dalam implementasinya. Harus dipahami juga bahwa dalam proses perencanaan pembangunan, beberapa elemen masyarakat yang berprofesi tertentu merasa berkewajiban untuk berperan aktif, karena memiliki kepentingan seperti para pemborong/developer, konsultan, pengusaha, dan sebagainya. Mereka umumnya ingin mengetahui arah ke mana pembangunan tersebut bergerak, dan jika memungkinkan akan diupayakan untuk diikuti demi memperlancar usaha atau meningkatkan keuntungan finansialnya.

Antara partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan (×) dengan aplikasi perencanaan strategis Kota Makassar (y) menunjukkan nilai $\times^2$ hitung = 15,32 lebih kecil daripada nilai $\times^2$ tabel pada taraf kepercayaan 0,05 (d,b,9) = 16,92 yang menunjukkan bahwa H° diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan antara partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dengan variasi tingkat aplikasi perencanaan strategis Kota Makassar di Kecamatan Rappocini. Selanjutnya hasil analisis uji kontingensi taraf kepercayaan 95 persen menghasilkan nilai sebesar 0,52 (IKH = 0, 52). Hal ini berarti bahwa antara variabel keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan variabel aplikasi rencana strategis Kota Makassar dikategorikan memiliki hubungan yang sedang.

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Renstra Kota Makassar cukup baik (sedang). Hasil wawancara dengan beberapa responden memberikan argumen bahwa dalam tahap pelaksanaan, kontribusi atau keterlibatan kurang optimal karena program pembangunan tersebut telah dijalankan oleh pihak-pihak tertentu yang telah ditunjuk sesuai aturan yang ada. Proyek atau kegiatan tersebut umumnya dalam skala besar sehingga partisipasi masyarakat tidak terlalu dilibatkan, lain halnya jika masih dalam taraf anggaran rendah masyarakat baru diikutkan seperti pembuatan drainase gang/lorong, program *paving block* di jalan, rehabilitasi poskamling, dan sebagainya. Masyarakat cenderung berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan: seperti gotong royong memperbaiki *drainase*, jalanan lingkungan, masjid, pos kamling, dan sebagainya. Partisipasi ini dilakukan karena adanya kepentingan turut menikmati fasilitas tersebut jika kondisi baik.

Antara partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan (×) dengan aplikasi perencanaan strategis Kota Makassar (y) menunjukkan nilai $\times^2$ hitung = 5,68 lebih kecil daripada nilai $\times^2$ tabel pada taraf kepercayaan 0,05 (d,b,9) = 16,92 yang menunjukkan bahwa H° diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan antara partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dengan variasi tingkat aplikasi perencanaan strategis Kota Makassar di Kecamatan Rappocini. Selanjutnya hasil analisis uji kontingensi taraf kepercayaan 95 persen menghasilkan nilai sebesar 0,36 (IKH = 0,36). Hal ini berarti bahwa antara variabel keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan variabel aplikasi rencana strategis Kota Makassar dikategorikan memiliki hubungan yang rendah (lemah).

Dari hasil pengolahan data di atas memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Rappocini dalam aplikasi Renstra pada bentuk pemeliharaan masih lemah. Berdasarkan hasil wawancara, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan program/proyek dikarenakan pada umumnya masyarakat berpendapat proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota merupakan tanggung jawab pemerintah, dan apabila terjadi kerusakan maka pemerintah pula yang wajib memperbaikinya. Hal tersebut telah dikemukakan sebelumnya bahwa pada tingkat perencanaan atau pelaksanaan, jika keterlibatan masyarakat belum optimal, maka pengaruh yang muncul yakni kurangnya kesadaran untuk memelihara hasil program pembangunan tersebut sebagai konsekuensi logis dari lemahnya rasa memiliki dari masyarakat.

5. PENUTUP

Tingkat implementasi terhadap perencanaan strategis di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dari hasil penelitian ini dinilai cukup baik, hal ini terlihat dari hasil pengolahan data dan kalkulasi rumusan serta nilai rata-rata dari beberapa komponen atau indikator yang diukur yang menunjukkan hal tersebut. Variabel yang berpengaruh pada implementasi Renstra berupa kemampuan aparat, keuangan daerah, sarana dan prasana serta perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan semuanya memberikan hasil kumulatif rata-rata sebesar 21,21 yang masuk kategori sedang atau cukup baik.

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Rappocini dalam aplikasi Renstra terbagi atas tiga hal utama, *pertama*, dalam tahap perencanaan partisipasi masyarakat sudah optimal (kuat) karena kesadaran untuk ikut terlibat sudah cukup bagus. Sedangkan *kedua*, pada tahap pelaksanaan partisipasi cenderung kurang maksimal (sedang) karena keterlibatan pada tahap ini lebih banyak menggunakan jasa teknis yang telah berpengalaman sesuai ketentuan. Selanjutnya *ketiga*, partisipasi dalam tahap pemeliharaan menunjukkan kategori rendah sebagai akibat kurangnya kesadaran dan rasa memiliki dari masyarakat itu sendiri. Dukungan keuangan daerah, kemampuan aparat kelurahan/kecamatan dan sarana prasarana dalam implementasi Renstra di Kecamatan Rappocini berdampak besar terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut. Sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih dioptimalkan jika dukungan tersebut mendapat perhatian yang baik.

Adapun rekomendasi yang perlu disampaikan yaitu diperlukan *treatment* guna mengembalikan kepercayaan dan semangat serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan melalui beberapa metode seperti; melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif untuk menggugah kesadaran masyarakat atas peran aktifnya, mencanangkan skala prioritas dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan keterbatasan anggaran yang dimiliki, berupaya meminimalisir unsur-unsur kepentingan politis dalam perencanaan tersebut, dan sebagainya.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di wilayah yang terkait dengan masyarakat hendaknya didahului perencanaan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dengan membahasnya bersama masyarakat. Instansi pemerintah bersifat mengarahkan dan memfasilitasi pelibatan masyarakat, jangan hanya pada wilayahnya yang mudah dijangkau tapi juga dilakukan pada wilayah-wilayah pinggiran yang selama ini kurang merasakan manfaat pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan masih kurang memadai, maka disarankan agar pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan tidak sekedar pada tahap perencanaan (Musrenbang), tapi juga hingga pada tahap pelaksanaan dan pemeliharaan. Program-program kerjasama operasional dengan masyarakat harus dikembangkan agar masyarakat merasa turut menjadi bagian dan bertanggung jawab dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kota Makassar. (2015). *Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2014*. Makassar: BPS.

Conyers, D. (2001). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

LAN & BPKP. (2000). *Perencanaan Stratejik Instansi Pemerintah*. Jakarta, Indonesia: LAN.

Sabatier, M. D. P. A. (1983). *implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.

Salusu, J. (2000). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta, Indonesia: PT. Grasindo.

Siagian, S. P. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta, Indonesia: PT. Rineka Cipta.

Silalahi, U. (2000). *Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfa Beta.

Tunggal, A. . (2003). *Manajemen: Suatu Pengantar*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.

Wahab, A. S. (2001). *Analisa Kebijaksanaan dari Formulir ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.

Weir, S. (1992). *Strategic Planning in Local Government*. Washington: Planner Press.

WJS Poerwadarminta. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.